



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL PEMATAN GSIANTAR

DJKN

2023

LAPORAN KINERJA

KPKNL PEMATANG SIANTAR

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pematang Siantar Tahun 2023. KPKNL Pematang Siantar telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen pengukuran kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pematang Siantar atas pencapaian tujuan/sasaran strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi.

Laporan Kinerja KPKNL Pematang Siantar Tahun 2023 merupakan bahan monitoring dan evaluasi kinerja tahun 2023 dan basis perencanaan kinerja tahun berikutnya. Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematang Siantar tahun 2023 sebesar 115,57% yang diperoleh dari capaian atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, mayoritas IKU telah mencapai target dan kami senantiasa berupaya meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih banyak pada segala pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pematang Siantar tahun 2023. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran capaian kinerja yang telah dicapai KPKNL Pematang Siantar pada tahun 2023 berupa keberhasilan, kegagalan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi .

Pematang Siantar, 07 Februari 2024

Plh. Kepala KPKNL Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik

Ester Rini Kartika Simatupang
NIP 19830812 200901 2 011



DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Tugas, Fungsi, dan Struktur KPKNL Pematang Siantar.....	1
B.Peran Strategis KPKNL Pematangsiantar	4
C.Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja.....	6
D.Sistematika Laporan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis	7
B. Penetapan Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A.Capaian Kinerja Organisasi	29
1. Evaluasi Kinerja Tahun 2023.....	31
2. Evaluasi Kinerja 2018-2023	42
B.Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP.....	53
A.Simpulan Umum.....	53
B.Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang.....	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Laporan akuntabilitas Kinerja KPKNL Pematang Siantar dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang disampaikan kepada *Stakeholder* melalui Laporan Kinerja KPKNL Pematang Siantar tahun 2023. Laporan Kinerja KPKNL Pematang Siantar tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja yang telah berhasil dicapai oleh KPKNL Pematang Siantar pada tahun 2023 sehingga laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN untuk tahun 2020-2024 yaitu:

“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, DJKN telah menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk membantu memudahkan pencapaian visi dan misi dalam rencana Strategis KPKNL Pematang Siantar ke dalam rencana kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin KPKNL Pematang Siantar Tahun 2023 terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis Kemenkeu Three KPKNL tahun 2023 adalah sebesar 115,57% dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan				
1a-CP		Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp2,4M)	114,61% (Rp5,35M)	114,61%
		a. PNBP Pengelolaan BMN	100% (Rp2,05M)	105,00% (Rp2,66M)	120%
		b. PNBP Piutang Negara	100% (Rp2,5Jt)	179,90% (Rp10,12Jt)	120%
		c. PNBP Lelang	100% (Rp1,94M)	140,88% (Rp2,68M)	120%
1b-CP		Persentase Produktivitas Lelang	80%	105,00%	120%
1c-CP		Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
2a-CP		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp75M)	166,31% (Rp103,11 M)	120%
		a. Pokok Lelang Kelas I	100% (Rp22M)	191,83% (Rp38,37M)	120%
		b. Pokok Lelang Pegadaian	100% (Rp53M)	154,15% (Rp64,74M)	120%
2b-CP		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	270,84%	120%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal				
3a-CP		Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	79,82%	117,38%
3b-CP		Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%	160,00%	120%
3c-CP		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	104,00%	103,57%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				

4a-CP		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	80%	97,84%	120,00%
4b-CP		Persentase Permohonan Lelang Online	86%	97,62%	113,51%
4c-CP		Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Coventional Auction	94%	100,00%	106,38%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				
5a-CP		Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0,00%	120,00%
5b-CP		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70%	142,31%	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
6a-CP		Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	96,88%	112,65%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif				
7a-CP		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100,00%	120,00%	120,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
8a-CP		Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00%	103,50%	108,82%
8b-CP		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100,00%	161,00%	120%
8c-CP		Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15,00%	0,00%	120%
		Deviasi Data PNBFLelang	15%	0,00%	120%
		Deviasi Data PNBFPiutang Negara	15%	0,00%	120%
9	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif				
9a-CP		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	99,14	115,57%%
9b-CP		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	99,22	120,00%

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Pematang Siantar menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negate dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dengan motto “*Mauliate*” (*Mandiri, Unggul, Integritas, Akuntabel, Tepat Waktu*), seluruh pejabat/pegawai KPKNL Pematang Siantar telah bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dalam *Kemenkeu Three* tahun 2023 dengan penuh pengabdian, tanggung jawab, dan penuh keikhlasan.

Akhir kata dengan semangat Birokrasi Reformasi dan untuk mewujudkan **Good Governance** dalam pelayanan kepada *stakeholder/customer* maka KPKNL Pematang Siantar akan tetap berpedoman pada serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur KPKNL Pematang Siantar

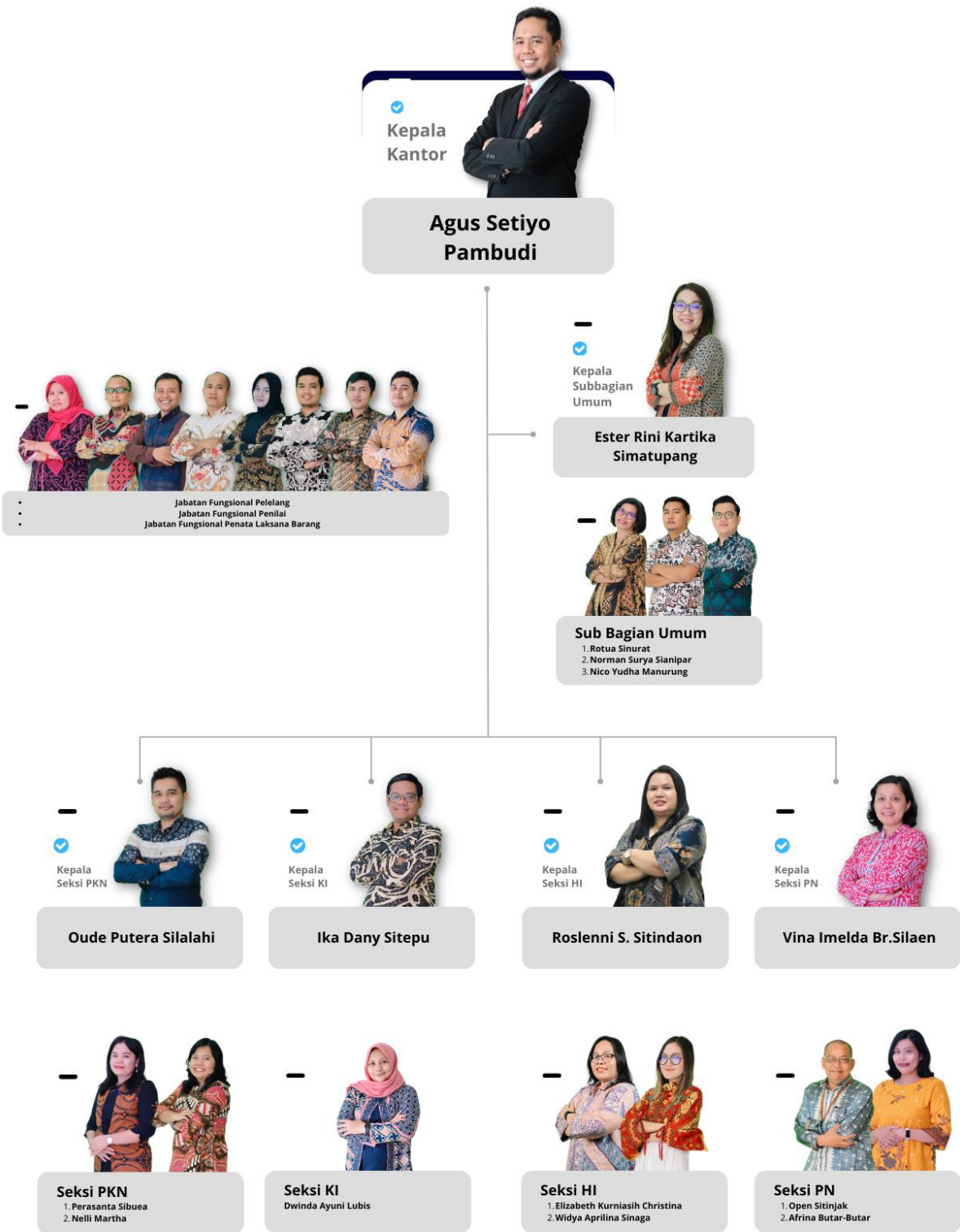
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan pasal 30 PMK nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL Pematang Siantar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL

Susunan Organisasi KPKNL terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi KPKNL Pematang Siantar



Sesuai dengan PMK nomor 154/PMK.01/2021, wilayah kerja KPKNL Pematang Siantar meliputi:

- a. Kota Pematangsiantar
- b. Kota Tebing Tinggi
- c. Kabupaten Samosir
- d. Kabupaten Simalungun
- e. Kabupaten Toba
- f. Kabupaten Dairi
- g. Kabupaten Pakpak Bharat

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh sumber daya manusia. Adapun jumlah pegawai pada periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- I. Berdasarkan Pangkat dan Golongan:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan

Pegawai	II				III				IV				Jumlah
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
Eselon III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Eselon IV	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	5
Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	6
Pelaksana	1	0	1	2	1	4	2		0	0	0	0	11
Jumlah	1	0	1	2	1	7	3	7	0	1	0	0	23

- II. Berdasarkan Pendidikan dan Golongan:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

Pegawai	Pendidikan					Jumlah
	SLTA	D-I	D-III	D-IV/S1	S2	
Eselon III	0	0	0	0	1	1
Eselon IV	0	0	0	4	1	5
Jabatan Fungsional	0	0	0	3	3	6
Pelaksana	2	1	3	4	1	11
Jumlah	2	1	3	11	6	23

III. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	3	6	1	10
Perempuan	0	1	12	0	13
Jumlah	0	4	18	1	23

IV. Berdasarkan Usia dan Golongan :

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Golongan

Kelompok Umur	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	0	3	1	0	4
31-40	0	1	10	0	11
41-50	0	0	6	1	7
>50	0	0	1	0	1
Jumlah	0	4	18	1	23

B. Peran Strategis KPKNL Pematang Siantar

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Pematang Siantar memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Pematang Siantar turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Pematang Siantar selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Penilaian

Penilaian terhadap Kekayaan Negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan

negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN. Dengan demikian pengelolaan kekayaan negara, menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Fokus pengurusan piutang berdasarkan PP nomor 33 tahun 2006 dilakukan terhadap piutang negara BUMN yang telah diserahkan dan piutang macet non perbankan yang berasal dari BUMN atau instansi pemerintah. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), ruang lingkup pengurusan piutang negara menjadi tidak hanya terbatas pada PUPN, tapi juga meliputi pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga yang mencakup penatausahaan, penagihan, penyerahan dan pengurusan oleh PUPN, penyelesaian serta pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*"

masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Setelah berlakunya PMK Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, lelang dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. Hal ini tentu saja semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh KPKNL Pematang Siantar adalah penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN. Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan, pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan seluruh Sasaran Strategis dapat tercapai dengan nilai indeks maksimal di atas 100% sehingga dapat menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,57%. Dari 20 (dua puluh) total Indikator Kinerja Utama (IKU) pada KPKNL Pematang Siantar, terdapat 11 (sebelas) IKU yang memiliki nilai indeks maksimal senilai 120%. Proses pencapaian seluruh IKU dimaksud akan dijelaskan dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja huruf A. Capaian Kinerja Organisasi.

D. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

BAB	I	Pendahuluan
BAB	II	Perencanaan Kinerja
BAB	III	Akuntabilitas Kinerja
BAB	IV	Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selama tahun 2023 KPKNL Pematang Siantar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Perencanaan strategis ditetapkan dengan beorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang saat ini dihadapi maupun yang akan timbul.

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

"Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam rangka mendukung visi tersebut, strategi yang ditetapkan KPKNL Pematang Siantar dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara
 - a. Implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bahan untuk menyusun LKPP.
 - b. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
 - c. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
 - d. Percepatan sertifikasi BMN.
2. Peningkatan kualitas pelayanan
 - a. Penerapan regulasi dan pedoman di bidang penilaian.
 - b. Standardisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal.
 - c. Pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah.
 - d. Pengembangan riset data dan informasi penilaian.
3. Optimalisasi pengurusan piutang negara
 - a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN diatas 1 Milyar.
 - b. Optimalisasi tahap pengurusan.
 - c. Penggalan potensi pengurusan piutang negara.
4. Peningkatan pelayanan lelang
 - a. Modernisasi lelang melalui e-auction

- b. Penguatan jabatan fungsional Pelelang.
 - c. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
5. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan
- a. Melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal.
 - b. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.
 - c. Penerapan TIK yang komprehensif.
 - d. Penerapan sistem informasi sesuai core bussiness.
 - e. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
 - f. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
 - g. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan perjanjian kinerja di lingkup KPKNL Pematang Siantar, Perjanjian Kinerja Nomor PK-8/WKN.02/2023 tanggal 31 Januari 2023 telah mengalami adendum sebanyak 1 (satu) kali.

Addendum atas perjanjian kinerja yang dilakukan meliputi;

1. Perubahan Nama Sasaran Strategis;
2. Penambahan Sasaran Strategis;
3. Pergeseran Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis;
4. Penambahan Indikator Kinerja Utama;
5. Penghapusan Indikator Kinerja Utama;
6. Perubahan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama;
7. Perubahan Kode Indikator Kinerja Utama.

Penetapan kinerja KPKNL Pematang Siantar tahun 2023 (setelah adendum) sesuai dengan peta strategis *Kemenkeu Three* terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja berdasarkan Peta Strategis KPKNL Pematang Siantar Tahun 2023
Sebelum Adendum

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
		2c-CP Persentase Pelaksanaan permohonan lelang online	86%
		2c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68
		3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
		3c-CP Persentase Penyelesaian BKP	100%

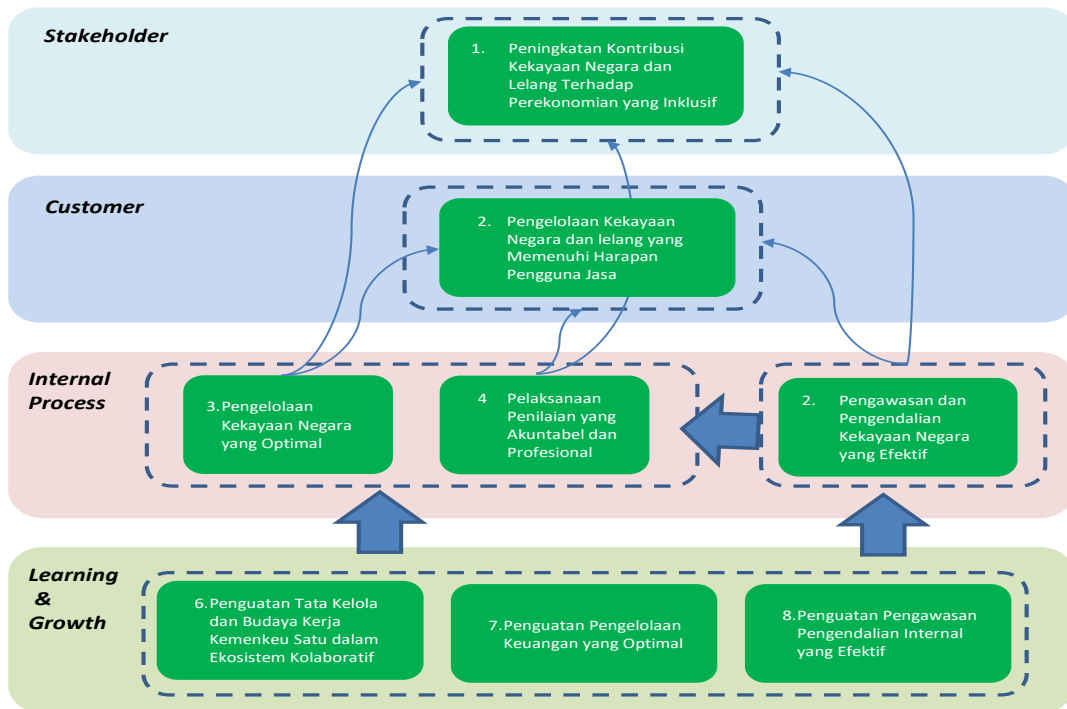
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
		4b-CP	Rata-Rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien	70%
5.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86
		5b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
6.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	6a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
		6b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5
		7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
8.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	8a-CP	Indeks Integritas	88,67
		8b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100
		8c-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja berdasarkan Peta Strategis KPKNL Pematang Siantar Tahun 2023
Setelah Adendum

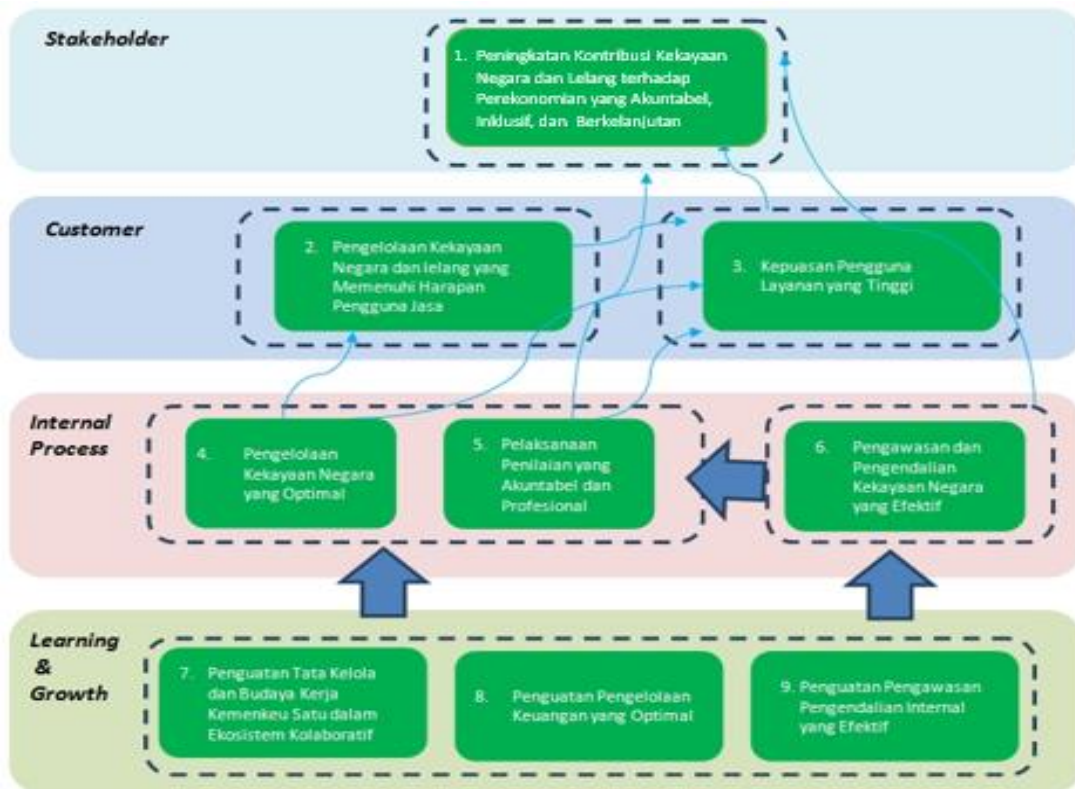
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68
		3b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%
		3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BPKN)	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	4a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	80%
		4b-CP	Persentase Permohonan Lelang <i>Online</i>	86%
		4c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-Auction</i> dan <i>e-Coventional Auction</i>	94%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		5b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
		8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
9.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	9a-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		9b-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60

Gambar 2.1
Peta Strategis KPKNL Pematang Siantar Tahun 2023 Sebelum Adendum



Gambar 2.2
Peta Strategis KPKNL Pematang Siantara Tahun 2023 Setelah Adendum



Peta strategis Kemenkeu-three Tahun 2023 mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian memiliki 3 (tiga) IKU, yaitu :

a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan strategis pengukuran IKU ini adalah dalam rangka optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

✓ PNBPN PENGELOLAAN BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- pemanfaatan barang milik negara; dan
- pemindahtanganan barang milik negara

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan,

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara. Adapun target PNBP Pengelolaan BMN pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.400.000.000,00.

✓ PNBP PIUTANG NEGARA (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. Adapun target PNBP Pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.500.000,00

✓ PNBP LELANG

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian,
- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi, dan
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Adapun target PNBP Lelang pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.940.000.000,00.

b. Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Tujuan strategis pengukuran IKU Persentase Produktivitas Lelang adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Adapun target IKU Persentase Produktivitas Lelang pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah sebesar 80%.

c. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publikdalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Adapun taeget IKU Indeks Integritas pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah sebesar 88,67.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa memiliki 2 (dua) IKU, yaitu:

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Lelang merupakan penjualan yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan didahului adanya pengumuman lelang. Pelayanan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari terwujudnya harga transaksi lelang yang kompetitif serta meningkatnya kontribusi bagi penerimaan negara. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Tujuan Strategis pengukuran IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Adapun target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang pada tahun 2023 adalah Rp 75.000.000.000 atau 100% dengan komponen sebagai berikut:

- ✓ Pada komponen pokok lelang kelas I, target tahun 2023 sebesar Rp 22.000.000.000.
- ✓ Pada komponen pokok lelang pegadaian, target tahun 2023 sebesar Rp 53.000.000.000.

b. Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

IKU Tingkat *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Angsuran
- ✓ Pelunasan
- ✓ Penarikan/ Pengembalian
- ✓ Pelunasan
- ✓ PSBDT
- ✓ Keringanan hutang yang lunas pada tahun 2023.

Adapun target IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah Rp205.000.000,00

3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara meliputi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-Lain (KNL), Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang. Kegiatan Pengelolaan Kekayaan Negara meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b. pengurusan piutang negara; dan
- c. pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNPB (*revenue generating*).
- c. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d. Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal memiliki 3 (tiga) IKU, yaitu:

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Optimalisasi yang dilakukan dapat berupa Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, atau Optimalisasi Lainnya (seperti penyerahan kepada pengelola sebagai BMN *Idle*, Rehabilitasi untuk BMN Rusak Berat, dan Penghapusan). IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN

dengan SBSK pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 memiliki target sebesar 68%.

b. Persentase BMN berupa Tanah yang Disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

IKU terkait sertifikasi tanah merupakan program pemerintah dalam rangka pengamanan BMN. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel adalah pengamanan kekayaan negara yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pengelolaan. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel dilaksanakan melalui penyelesaian verifikasi atas hasil identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- ✓ Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- ✓ Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
- ✓ Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- ✓ K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
- ✓ Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- ✓ Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Pada tahun 2023, ruang lingkup pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah meliputi seluruh tanah yang belum/sudah bersertipikat dengan pengelompokan ke dalam 4 kategori dengan rincian sebagai berikut.

- ✓ K1 (Kategori 1) yaitu tanah dengan status clean and clear atau tanah yang memiliki data yuridis maupun secara fisik lengkap serta tidak terdapat sengketa/berperkara. Output (produk keluaran) Tanah yang termasuk dalam

kategori K1 adalah terbitnya Sertipikat Hak Pakai a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Lembaga yang bersangkutan.

- ✓ K2 (Kategori 2) yaitu tanah dengan status dikuasai serta tidak dalam proses sengketa/ berperkara namun terdapat kekurangan data yuridis dan/atau tidak dapat dapat diterbitkan sertipikatnya. Produk keluaran tanah yang masuk dalam kategori K2 adalah pelaksanaan pengukuran yang dilanjutkan penerbitan sekurang-kurangnya Peta Bidang Tanah (PBT). Untuk itu, tidak menutup kemungkinan bidang tanah dalam kategori ini untuk disertipikatkan sesuai ketentuan.
- ✓ K3 (Kategori 3) yaitu tanah yang dalam status sengketa/berperkara ataupun tanah yang memiliki potensi konflik kepemilikan dengan pihak lain. Satuan kerja diimbau melakukan identifikasi untuk tanah yang termasuk dalam kategori K3. Produk keluaran dari tanah pada kategori ini adalah sekurang-kurangnya Nomor Identifikasi Sementara (NIS) ataupun dokumen lainnya. Tidak menutup kemungkinan bidang tanah dalam kategori ini untuk disertipikatkan sesuai ketentuan.
- ✓ K4 (Kategori 4) yaitu tanah yang sudah bersertipikat berupa sertipikat hak pakai namun belum dilakukan pembaruan pada Master Aset SIMAN.

Adapun target IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah 355 NUP dan 367 bidang tanah.

c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang negara (BKPN)

IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang negara (BKPN) menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Tujuan IKU ini adalah dalam rangka percepatan penyelesaian *outstanding* piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Adapun target IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang negara (BKPN) pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah sebanyak 28 BKPN atau sebesar 100%.

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

a. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi

penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Tujuan strategis IKU ini adalah untuk mewujudkan struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang. IKU ini difokuskan hanya pada BMN yang berupa tanah dan tanah/bangunan dengan tahapan identifikasi dan inventarisasi aset tanah/bangunan yang akan dievaluasi kinerjanya, pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, survei, dan data sekunder, pengolahan data menggunakan aplikasi portofolio, pelaporan evaluasi kinerja portofolio aset serta tindak lanjut evaluasi portofolio untuk perubahan struktur portofolio. Target IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah 100% atau NUP yang terdiri atas:

- ✓ Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN sebanyak 30 NUP, dan
- ✓ Target/Realisasi Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja BMN sebanyak 7 NUP

b. Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online

Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh stakeholder/ Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Nonseksekusi Suakarela, Nonseksekusi Wajib, dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id.

Tujuan dari IKU ini adalah:

- ✓ menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang
- ✓ memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun
- ✓ menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negative
- ✓ menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang

5) perbaiki citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan

Adapun Target IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online Tahun 2023 pada KPKNL Pematang Siantar adalah 86%.

c. Persentase Pelaksanaan Lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction*

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Aplikasi lelang melalui internet dapat melalui situ web yang disediakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu *lelang.go.id*.

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- ✓ Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- ✓ *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Tujuan strategis IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* adalah:

- ✓ menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang;
- ✓ memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun;
- ✓ menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif;
- ✓ menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang; dan
- ✓ perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Adapun target IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah 94%

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

a. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang

digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasinya apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 0% Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Tujuan IKU ini adalah mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

Adapun target IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2023 pada KPKNL Pematang Siantar adalah sebesar 25%.

- b. Rata-Rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien
Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup penilaian adalah penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah

dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon.
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survey lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD).
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL).
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima. Tujuan dari IKU ini adalah mewujudkan nilai wajar yang cepat dan akurat untuk dapat dijadikan acuan dalam berbagai kebutuhan. Target IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif, dan efisien Tahun 2023 pada KPKNL Pematang Siantar adalah sebesar 70%.

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi

perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif memiliki 1 IKU, yaitu Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN yang diukur pada IKU ini meliputi: c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; g. Pemindahtanganan; Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Sewa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perjanjian Sewa 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL
Kerja Sama Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)

Tujuan dari IKU ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L. Target IKU Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023 pada KPKNL Pematang Siantar adalah sebesar 86%.

7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan,

dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi public yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Sasaran strategis Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif mempunyai satu IKU, yaitu Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya untuk mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan dan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal satu dari usulan rencana pengembangan kompetensi telah dilaksanakan, dan minimal satu yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan dari IKU ini adalah mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2023 pada KPKNL Pematang Siantar adalah sebesar 100%.

8. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Adapun target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah 100%

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. IKU diukur dari 3 (tiga) komponen yakni:

1. Proses Pengajuan Sertifikasi Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan serta melaksanakan update data tanah pada aplikasi SIMAN modul Master Aset. Target sertifikasi BMN berupa Tanah TA 2023, dibagi dalam empat kategori 1) clean and clear (kategori K1) 2) not clean but clear (kategori K2) 3) clean but not clear & not clean and not clear (kategori K3) 4) Update & Validasi Data terhadap tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga (kategori K4). Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mengusulkan sertifikasi ke Kantor Pertanahan untuk Kategori K1, K2, dan K3 sedangkan Update & Validasi Data terhadap tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga untuk Kategori K4.
2. Pemanfaatan Aplikasi BMN Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Pemanfaatan BMN dengan Menggunakan Aplikasi BMN pada satker terlampir.
3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan 25system aplikasi pengadaan yang terdiri:
 - a. SiRUP Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target;
 - b. e-Tendering Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP;
 - c. e-Purchasing Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan ePurchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket ePurchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai;
 - d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan

Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

- e. e-Kontrak Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Tujuan Strategis IKU ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan. Adapun target IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah 100%.

c. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- ✓ Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- ✓ Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15% sedangkan Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 15%, sehingga rata-rata target 15%.

9. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

a. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan system penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

- ✓ Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%)
 - Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja 20%
 - Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja 25%
 - Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja 30%
 - Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik) Perjanjian Kinerja 25%
- ✓ Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%)
 - Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 20%
 - Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 25%
 - Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 30%
 - Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik) SKP 25%

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja dan risiko di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja dan risiko di masa mendatang. Target dari Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko adalah 80.

b. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 12 (dua belas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi;
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE);
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA);
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP);
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS);
6. Penyusunan Profil Pegawai;
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI;
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas

Tujuan dari IKU ini adalah mengukur efektivitas pasak kerja penilaian efektivitas UKI. Target dari Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif adalah 60.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023, terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar Tahun 2023 telah memperoleh hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematang Siantar sebesar 115,57%.

Adapun rincian capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Three* KPKNL Pematang Siantar Tahun 2023 dapat dielaborasi sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja KPKNL Pematang Siantar Tahun 2023

Kode	IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(30%)			33,18%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan			110,61%
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	114,61%	114,61%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	105,00%	120,00%
1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
	Customer Perspective(20%)			24,00%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			120,00%
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	128,91%	120,00%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	241,47%	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)			28,94%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			114,62%
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	79,82%	117,38%
3b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%	160,00%	120,00%
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	103,57%	103,57%
4	Penerapan Tata Kelola kekayaan Negara dan lelang yang Efektif			112,17%

4a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	80%	97,84%	120,00%
4b-CP	Persentase Permohonan lelang Online	86%	97,62%	113,51%
4c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	100,00%	106,38%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0,00%	120,00%
5b-CP	Rata-Rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien	70%	142,31%	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			112,65%
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	96,88%	112,65%
Learning & Growth Perspective (25%)				29,45%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif			120,00%
7a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal			113,36%
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	103,50%	103,50%
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	161,00%	120,00%
8c-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	0,00%	120,00%
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif			120,00%
9a-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	99,14	115,57%
9b-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	99,22	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				115,57%

1. Evaluasi Kinerja Tahun 2023

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Three* Tahun 2023 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu-Three* Tahun 2023 sebagai berikut:

1.1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

IKU 1.1.1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang. Untuk realisasi persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.976.785.774,00 atau 114,61% dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal. Masing-masing capaiannya pada tahun 2023 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Per 31 Desember 2023

Uraian	Target 2023	Realisasi 2023
a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp2.400.000.000,00	Rp2.436.158.170,00
b. PNBP Piutang Negara	Rp2.500.000,00	Rp7.059.695,00
c. PNBP Lelang	Rp 1.940.000.000	Rp4.976.785.774,00
Capaian IKU		114,61%

Tabel 3.3
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Per Triwulan s.d. 31 Desember 2023

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	17,07%	37,94%	37,94%	76,28%	76,28%	114,61%	114,61%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	114,61%	114,61%	

IKU 1.1.2. Persentase Produktivitas Lelang

IKU persentase produktifitas lelang merupakan perbandingan antara jumlah realisasi frekuensi lelang laku dengan jumlah realisasi frekuensi lelang dalam

setahun. Jumlah realisasi frekuensi lelang laku secara keseluruhan pada tahun 2023 adalah 105 dengan jumlah realisasi frekuensi lelang secara keseluruhan adalah 498 sehingga menghasilkan persentase 105,00% atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal dengan target 80%, dimana masing-masing capaiannya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Produktivitas Lelang Per 31 Desember 2023

No.	Rincian IKU	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Jumlah Frekuensi Lelang		498
2.	Jumlah Frekuensi Lelang Laku		105
		80%	105,00%
Capaian IKU		120,00%	

Tabel 3.5
Produktivitas Lelang Per Triwulan s.d. 31 Desember 2023

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	53,97%	73,80%	73,80%	90,16%	90,16%	105,00%	105,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	112,70%	112,70%	120,00%	120,00%	

IKU 1.1.3. Indeks Integritas

Realisasi dari IKU ini merupakan realisasi secara nasional, yaitu sebesar 89,17 dari target 88,67. Sehingga, perolehan IKU tidak mencerminkan nilai indeks per unit. Namun demikian, KPKNL Pematang Siantar berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan dapat menyumbang kenaikan capaian indeks integritas secara nasional di tahun 2024 dari capaian tahun ini.

Tabel 3.6
Indeks Integritas Per 31 Desember 2023

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	88,67	88,67	Max/AVG
Realisasi	-	-	-	-	-	89,17	89,17	
Capaian	-	-	-	-	-	100,56%	100,56%	

1.2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

IKU 1.2.1. Persentase Realisasi Pokok Lelang

IKU berupa persentase realisasi pokok lelang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Pokok Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian. Capaian IKU pada tahun 2023 untuk IKU persentase realisasi pokok lelang adalah sebesar 128,91% dari indeks tanpa batas atau 120,00% dari indeks batas maksimal dengan nilai Rp96.681.126.091,00. Masing-masing capaiannya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Hasil Lelang (Pokok Lelang) Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Target	Realisasi
1.	Pokok Lelang Kelas I	Rp22.000.000.000,00	Rp29.795.000.191,00
2.	Pokok Lelang Pegadaian	Rp53.000.000.000,00	Rp66.886.125.900,00
Capaian IKU			120,00%

Tabel 3.8
Hasil Lelang (Pokok Lelang) Per Triwulan s.d. 31 Desember 2023

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	PoI/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	17,31%	44,95%	44,95%	76,28%	76,28%	128,91%	128,91%	
Capaian	86,54%	112,38%	112,38%	108,96%	108,96%	120,00%	120,00%	

IKU 1.2.2. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU tingkat penurunan outstanding piutang negara merupakan IKU yang bertujuan untuk mengurangi saldo outstanding piutang. Sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Pematang Siantar pada awal tahun 2023, target tingkat penurunan outstanding piutang negara adalah sebesar Rp205.000.000,00. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp495.006.649,03,00 dengan persentase sebesar 241,47% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

Tabel 3.9
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Per 31 Desember 2023

Uraian	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian IKU
Tingkat penurunan outstanding piutang negara	Rp205.000.000,00	Rp495.006.649,03	120,00%%

Tabel 3.10
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Per Triwulan s.d. 31 Desember 2023

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	27,16%	53,85%	53,85%	99,51%	99,51%	241,47%	241,47%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

1.3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

IKU 1.3.1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Tabel 3.11
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Per 31 Desember 2023

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target		50%	50%	55%	55%	68%	68%	Max/TLK
Realisasi		73,67%	73,67%	86,00%	86,00%	79,82%	79,82%	
Capaian		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-lain (KNL), Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*); 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (revenue generating); 3) Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); 4) Adanya

manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Optimalisasi yang dilakukan dapat berupa Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, atau Optimalisasi Lainnya (seperti penyerahan kepada pengelola sebagai BMN *Idle*, Rehabilitasi untuk BMN Rusak Berat, dan Penghapusan).

Target keseluruhan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK untuk tahun 2023 sebesar 68%. Untuk realisasi s.d 31 Desember 2023 sebesar 79,82% atau 117,38% dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.

IKU 1.3.2. Persentase BMN berupa Tanah yang Disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)

Tabel 3.12
Persentase BMN berupa Tanah yang Disertifikatkan (sesuai Target Kriteria) Per 31 Desember

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase BMN berupa Tanah yang Disertifikatkan (sesuai Target Kriteria)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi		53,80%	53,80%	81,41%	81,41%	160,00%	160,00%	
Capaian		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Realisasi Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan pada tahun 2023 adalah 568 bidang tanah dengan target 2023 sebesar 355 bidang tanah. Dengan demikian capaian IKU tercatat sebesar 160% dengan target 100% atau mencapai 120,00% dengan indeks batas maksimal.

IKU 1.3.3. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Tabel 3.13
Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BPKN) Per 31 Desember 2023

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BPKN)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	7,14%	29%	29%	57,00%	57,00%	103,57%	103,57%	
Capaian	71,43%	95,24%	95,24%	95,24%	95,24%	103,57%	103,57%	

Realisasi berupa Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BPKN) pada KPKNL Pematang Siantar s.d 31 Desember 2023 adalah 29 BPKN dari target tahun 2023 sebesar 28 BPKN dengan capaian sebesar 103,57% atau mencapai 103,57% dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal

1.4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

IKU 1.4.1. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Tabel 3.14
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Per 31 Desember 2023

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target				75%	75%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi				78,26%	78,26%	97,84%	97,84%	
Capaian				104,35%	104,35%	120,00%	120,00%	

Realisasi berupa Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) s.d 31 Desember 2023 adalah:

- sebanyak 36 NUP dari target tahun 2023 adalah 37 NUP untuk Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN
- sebanyak 11 NUP dari target tahun 2023 adalah 9 NUP untuk Target/Realisasi Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja BMN

Dengan demikian, capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah sebesar 97,84% atau mencapai 120,00% dengan indeks batas maksimal.

IKU 1.4.2. Persentase Permohonan Lelang *Online*

Tabel 3.15
Persentase Permohonan Lelang *Online* Per 31 Desember 2023

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Permohonan Lelang <i>Online</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%	Max/TLK
Realisasi	116,28%	97,42%	97,42%	96,25%	96,25%	97,62%	97,62%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	113,51%	113,51%	

Realisasi berupa Persentase Permohonan Lelang *Online* s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 97,62% dari target 86% atau mencapai 113,51% dengan indeks batas maksimal.

IKU 1.4.3. Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*

Tabel 3.16
Persentase Pelaksanaan Lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* Per 31 Desember 2023

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-Auction</i> dan <i>e-Conventional Auction</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	Max/TLK
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	

Target Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* tahun 2023 adalah 92% dengan realisasi adalah sebesar 108,70%, dengan jumlah relisasi frekuensi *e-auction* sebanyak 433 dan *e-conventional auction* sebanyak 0 dari 433 frekuensi lelang secara keseluruhan. Dengan demikian terkait capaian IKU ini adalah sebesar 108,70%.

1.5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

IKU 1.5.1. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Tabel 3.17
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Per 31 Desember 2023

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Max/TLK
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Realisasi Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian pada tahun 2023 adalah sebesar 0,00% dari target pada tahun 2023 adalah 25% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

IKU 1.5.1. Rata-Rata Indeksi Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Tabel 3.18
Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien Per 31 Desember 2023

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/TLK
Realisasi	100%	94,19%	94,19%	95,65%	95,65%	142,31%	142,31%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Realisasi berupa Rata-Rata Indeksi Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 142,31% atau mencapai 120,00% dengan indeks batas maksimal.

1.6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

IKU 1.6.1. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Tabel 3.19
Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Efisien Per 31 Desember 2023

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target		50%	50%	50%	50%	86%	86%	Max/TLK
Realisasi		70,97%	70,97%	70,97%	70,97%	96,88%	96,88%	
Capaian		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	112,65%	112,65%	

Realisasi berupa Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 96,88% dari target 86 % atau mencapai 112.65% dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.

1.7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

IKU 1.7.1. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Tabel 3.20
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Per 31 Desember 2023

K-Wide	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tahun 2023 mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dimana jumlah bawahan yang memenuhi kriteria adalah 23 pegawai. Salah satu penyebab IKU ini dapat tercapai maksimal karena pelaksanaan diklat dilakukan baik secara mandiri melalui KLC Kementerian Keuangan maupun melalui pemanggilan diklat yang dilakukan setiap bulannya

1.8. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

IKU 1.8.1. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tabel 3.21
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Per 31 Desember 2023

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	95%	95,5%	95,5%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	95,20%	114,60%	114,60%	120,00%	120,00%	103,50%	103,50%	
Capaian	99,69%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	1003,50%	1003,50%	

Ketentuan perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) pada tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah:

- Capaian IKU PKPA untuk triwulan I s.d III mengacu pada capaian IKPA Januari s.d triwulan periode pelaporan. Dengan demikian, capaian IKU PKPA untuk triwulan I s.d III sama dengan nilai IKPA yang disajikan pada OM SPAN.
- Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing, yaitu SMART 50% dan IKPA 50%.

Realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 103,50% dari target yang ditetapkan yaitu 100% atau sebesar 103,50% dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.

IKU 1.8.2. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Tabel 3.22
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Per 31 Desember 2023

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target						100%	100%	Max/TLK
Realisasi						161,00%	161,00%	
Capaian						120,00%	120,00%	

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai. Realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2023 adalah 161,00% dari target sebesar 120,00%.

IKU 1.8.3. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Tabel 3.23
Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN Per 31 Desember 2023

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Max/TLK
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- a. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN tahun 2023 adalah 15%, target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang tahun 2023 adalah 15,00%, sehingga rata-rata target tahun 2023 adalah 15%. Adapun realisasi deviasi data PNBPN Fungsional DJKN pada tahun 2023 adalah sebesar 0,00% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

1.9. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

1.8.1. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Tabel 3.24
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko Per 31 Desember 2023

K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target						80	80	Max/TLK
Realisasi						99,14	99,14	
Capaian						115,57%	115,57%	

Realisasi berupa Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 99,14 dari target 80 atau mencapai 115,57% dengan indeks batas maksimal.

1.8.2. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Tabel 3.25
Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif Per 31 Desember 2023

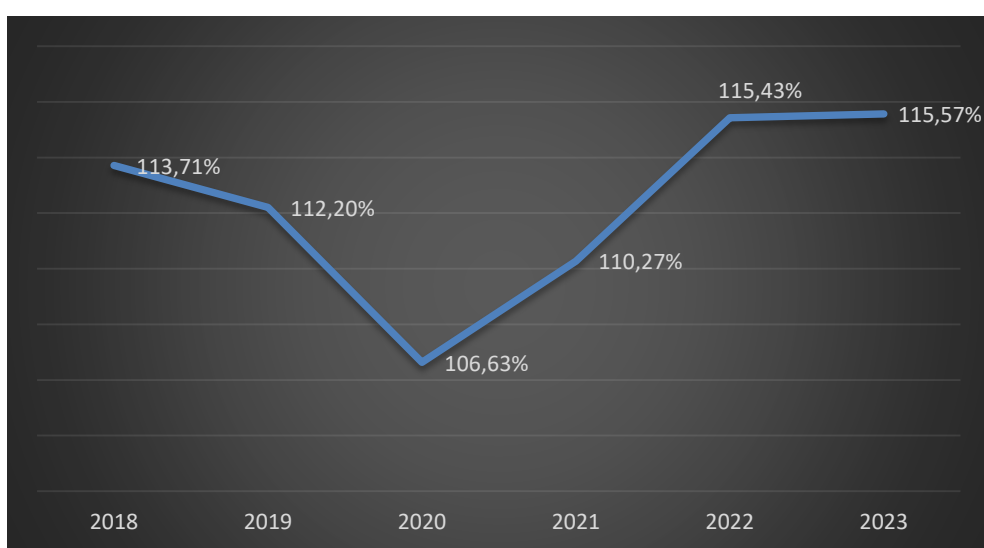
K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target						60	60	Max/TLK
Realisasi						99,22	99,22	
Capaian						120,00%	120,00%	

Realisasi berupa Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 99,22 dari target 60 atau mencapai 120% dengan indeks batas maksimal.

2. Evaluasi Kinerja 2018-2023

Gambaran kinerja KPKNL Pematang Siantar selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat diketahui dengan cara membandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejenis yang terdapat dalam Kontrak Kinerja KPKNL Pematang Siantar Tahun 2023 s.d. 5 (lima) tahun terakhir, baik berupa perbandingan target dan realisasi kinerja yang dituangkan dalam bentuk tabel maupun perbandingan capaian kinerja dalam bentuk grafik. Tren NKO dalam 5 tahun terakhir dan hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada KPKNL Pematang Siantar tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
NKO KPKNL Pematang Siantar Tahun 2018-2023



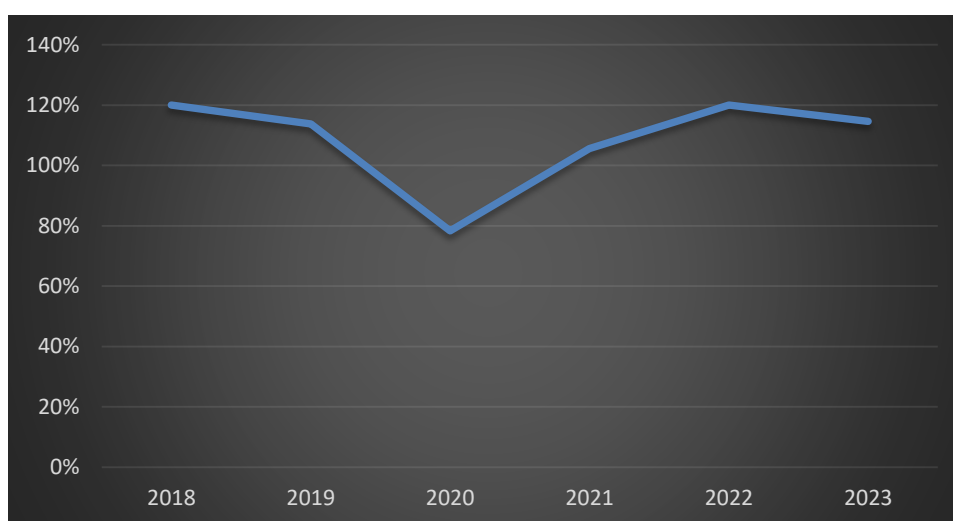
2.1. IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang atau IKU Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara

Tabel 3.26

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2023	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp4.342.500.000,00)	114,61% (Rp4.976.785.774,00)
2022	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp3.957.500.000,00)	120,00% (Rp 5.345.076.194)
2021	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp4.113.600.000,00)	105,58% (Rp4.349.770.624,00)

2020	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp4.882.053.120,00)	78,33% (Rp3.824.089.766,00)
2019	Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara	100% (Rp11.477.876.000,00)	113,82% (Rp9.276.647.483,55)
2018	Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara	100% (Rp1.137.000.000,00)	120,00% (Rp1.469.434.317,00)

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun Tahun 2018-2023



2.2. IKU Persentase Produktivitas Lelang

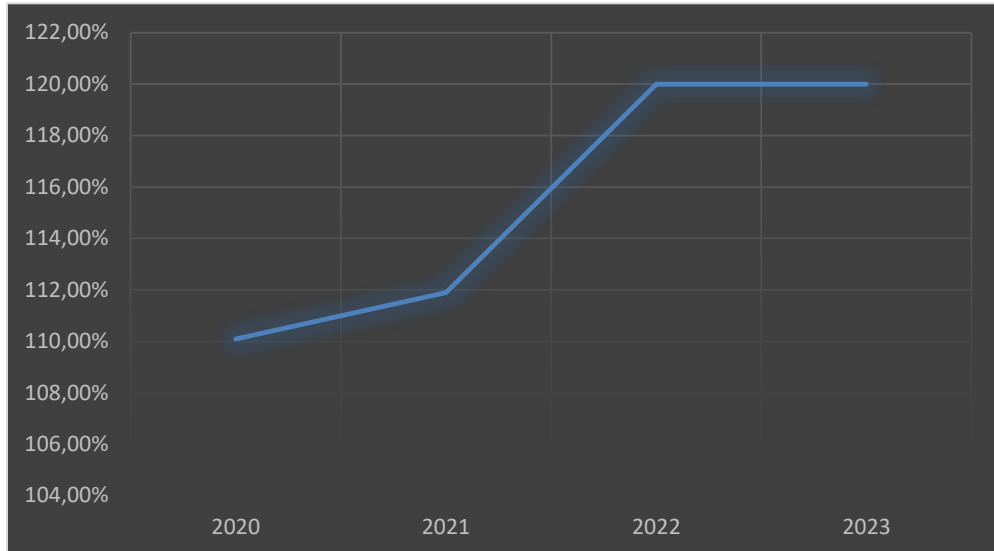
Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2023	Persentase Produktivitas Lelang	80%	105,00%
2022	Persentase Produktivitas Lelang	36%	45,15%
2021	Persentase Produktivitas Lelang	35%	39,16%
2020	Persentase Produktivitas Lelang	34%	37,43%

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase produktivitas lelang di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU persentase persentase produktivitas lelang pada tahun 2020 adalah 34% dengan realisasi 37,43% sehingga capaian 110,09%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 35% dengan realisasi 39,16% sehingga capaian 111,89%. Pada tahun 2022, target IKU tersebut 36% dengan realisasi 45,15% sehingga capaian 120,00%.

Pada tahun 2023, target IKU tersebut 80% dengan realisasi 105% sehingga capaian 131,25%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian

tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2022 dan 2023 dengan nilai 120% dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 110,09% seperti yang terlihat pada grafik berikut:

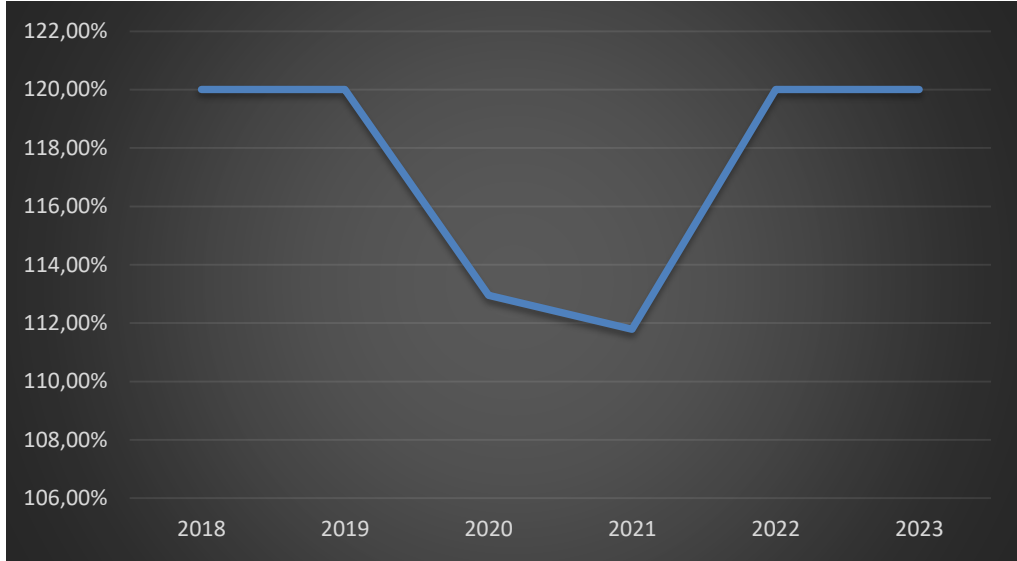
Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja IKU Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2020-2023



2.3. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang atau IKU Persentase Hasil Lelang

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Capaian
2023	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp75.000.000.000,00)	120,00% (Rp96.681.126.091,00)
2022	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp62.000.000.000,00)	120,00% (Rp103.109.295.730,00)
2021	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp74.000.000.000,00)	111,79% (Rp82.726.826.913,00)
2020	Persentase hasil lelang (pokok lelang)	100% (Rp43.373.625.199,00)	112,95 (Rp64.418.876.798,00)
2019	Persentase Hasil Lelang	100% (Rp57.716.000.000,00)	120,00% (Rp83.366.970.127,00)
2018	Persentase Hasil Lelang	60% (Rp15.968.000.000,00)	120,00% (Rp 23.172.150.421,00)

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2018-2023

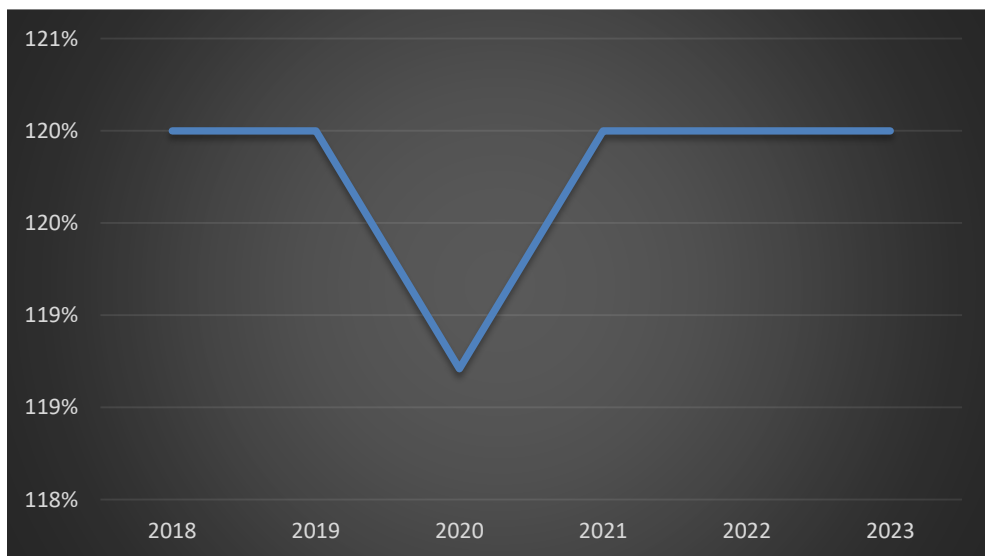


2.4. IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Tabel 3.29

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2023	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	120,00%
2022	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	120,00%
2021	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	120,00%
2020	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)	3%	118,71%
2019	Persentase hasil pengurusan piutang negara	100%	120,00%
2018	Persentase hasil pengurusan piutang negara	100%	120,00%

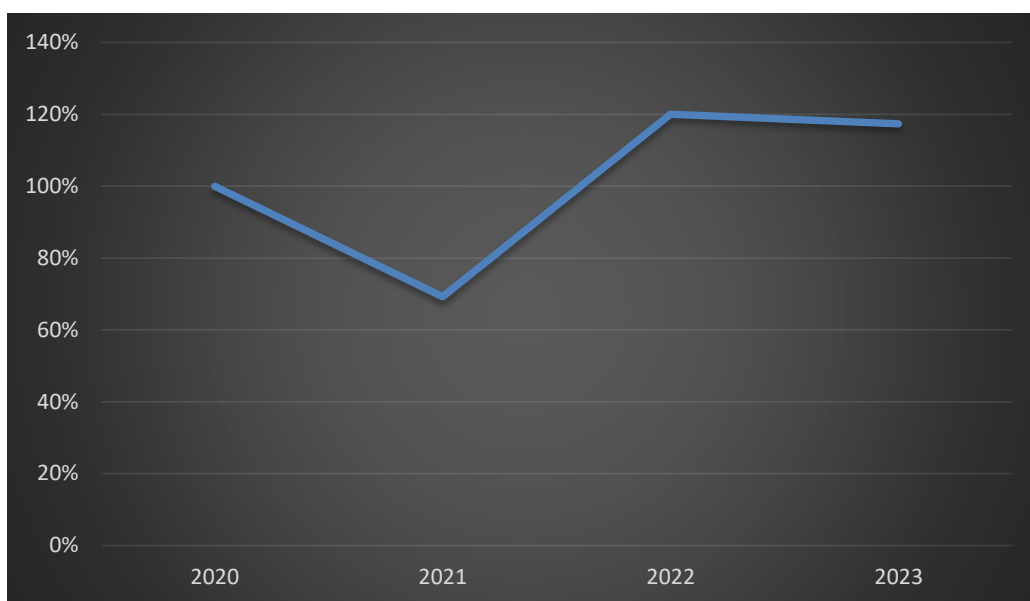
Grafik 3.5
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2018-2023



2.5. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2023	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%	117,38%
2022	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	120,00%
2021	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	69,25%
2020	Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%	100%

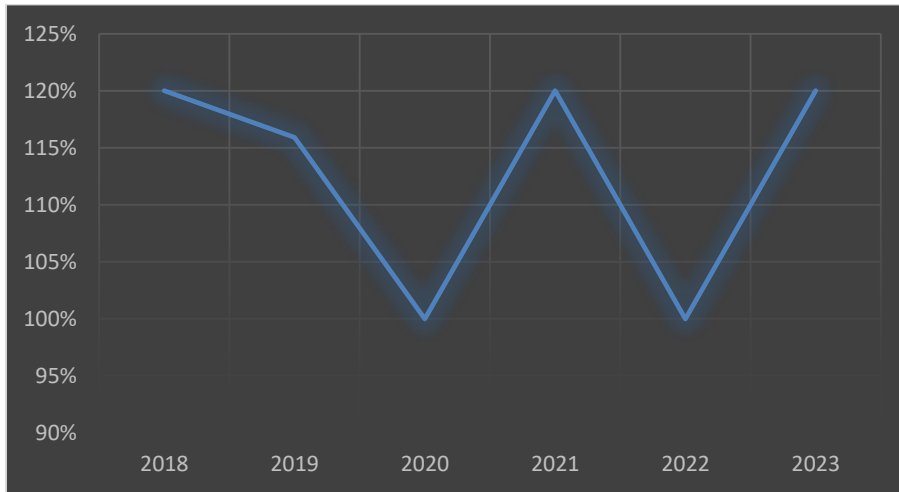
Grafik 3.6
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2020-2023



2.6. IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2023	Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100% (355 NUP)	120,00% (568 NUP)
2022	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100% (440)	115,91% (510 NUP)
2021	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100% (259)	100% (259)
2020	Persentase bidang tanah BMN yang telah disertifikatkan	100% (36 NUP)	120,00% (44 NUP)
2019	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100% (18 NUP)	100,00% (18 NUP)
2018	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100% (11 NUP)	120,00% (30 NUP)

Grafik 3.7
Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria) Tahun 2018-2023

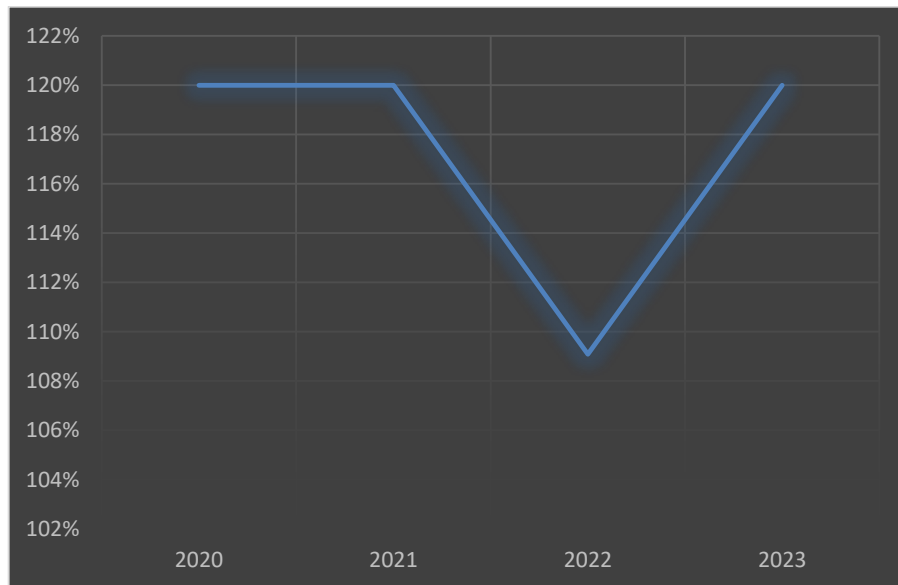


2.7. IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Tabel 3.32

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2023	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	80%	120,00%
2022	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	120,00%
2021	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	109,09%
2020	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	120,00%

Grafik 3.8
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2020-2023

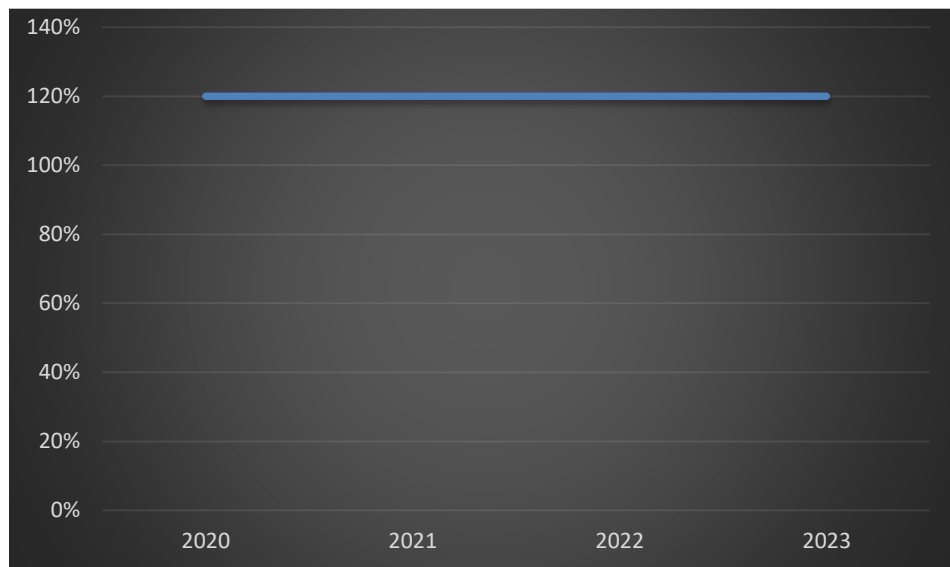


2.8. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Tabel 3.33

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2023	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	120,00%
2022	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	120,00%
2021	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	120,00%
2020	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	120,00%

Grafik 3.9
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2020-2023

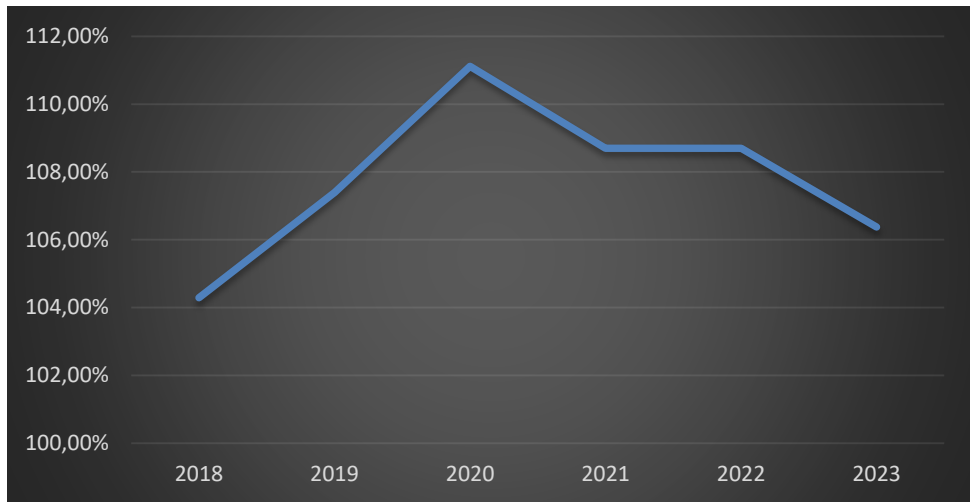


2.9. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-conventional Auction*

Tabel 3.34

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2023	Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan (Sesuai T Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i> arget Kriteria)	94%	106,38%
2022	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%	108,70%
2021	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%	108,70%
2020	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	90%	111,11%
2019	Persentase implementasi <i>e-auction</i>	90%	107,40%
2018	Persentase implementasi <i>e-auction</i>	85%	104,29%

Grafik 3.10
Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-conventional Auction Tahun 2018-2023

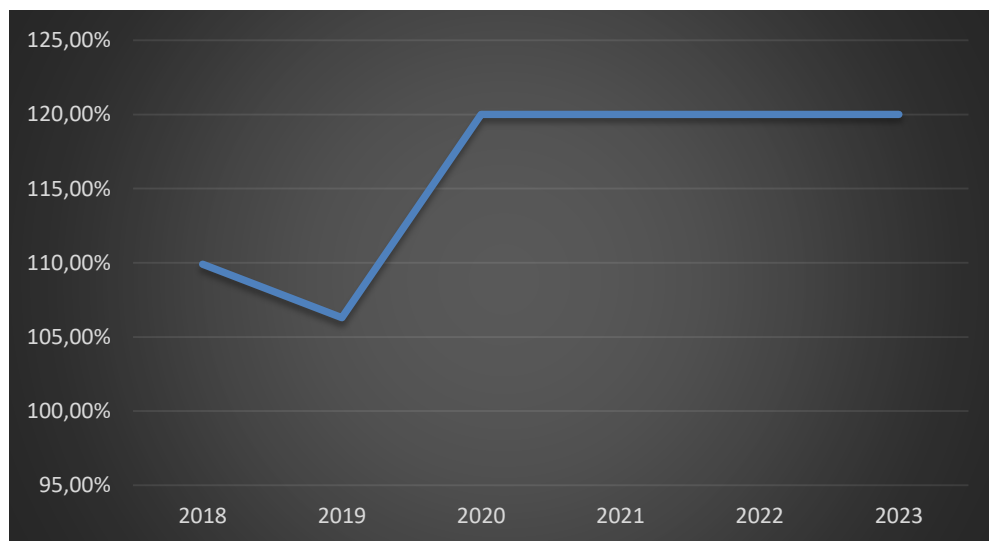


2.10. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Tabel 3.35

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2023	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%
2022	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%
2021	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%
2020	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%
2019	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	87%	106,29%
2018	Persentase pemenuhan standar <i>hard competency</i>	91%	109,89%

Grafik 3.11
IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2018-2023

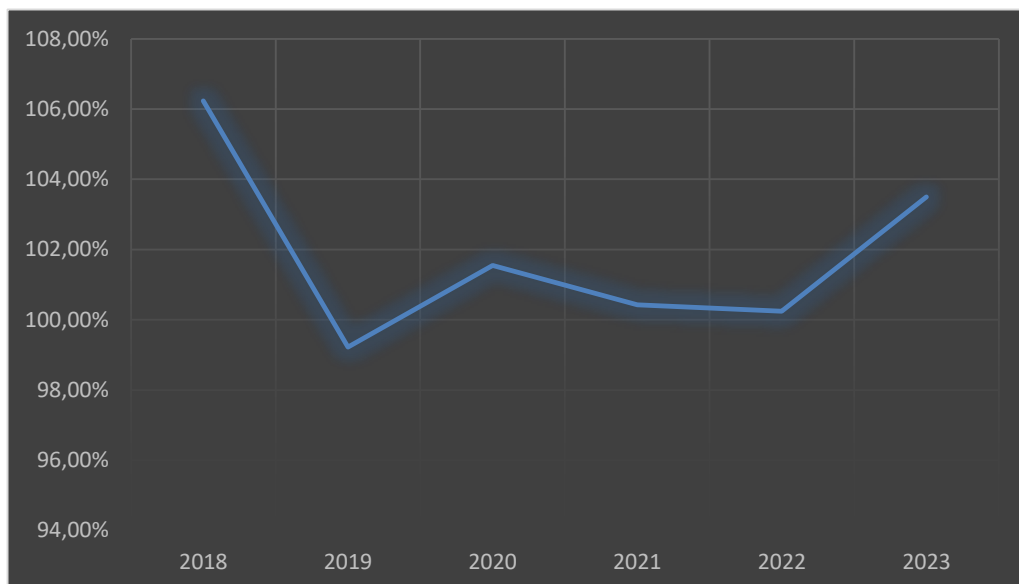


2.11. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tabel 3.35

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2023	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	103,50%
2022	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	100,24%
2021	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	100,43%
2020	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	101,55%
2019	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	99,22%
2018	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	106,23%

Grafik 3.12
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018-2023

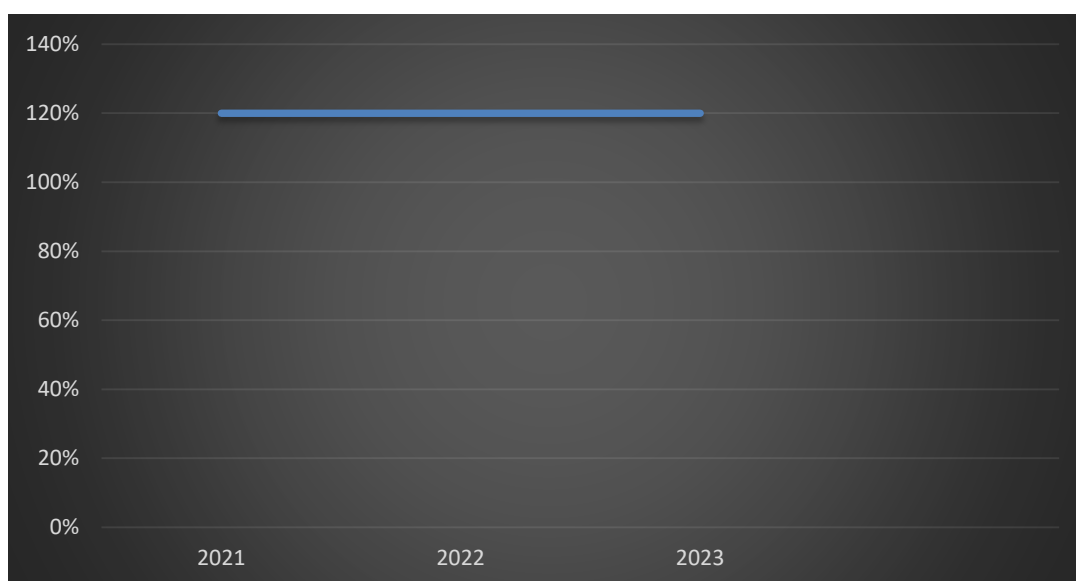


2.12. IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Tabel 3.36

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2023	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	25%	120,00%
2022	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	19%	120,00%
2021	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	22%	120,00%

Grafik 3.13
Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN Tahun 2018-2023



B. Realisasi Anggaran

Untuk pembiayaan satuan kerja di lingkungan KPKNL Pematang Siantar dalam Tahun 2023 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan pagu sebesar Rp1.857.775.000,00 setelah revisi dan penghematan (*self blocking*) yang dilakukan sepanjang tahun 2023 direalisasikan penyerapan anggaran atas pagu tersebut sebesar Rp 1.691.039.054,00 atau mencapai 91,02%.

Komponen perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) terdiri dari capaian IKPA dengan bobot 50% dan capaian SMART dengan bobot 50%, maka untuk mengetahui salah satu capaian komponen, yaitu IKPA harus dilakukan perhitungan beberapa indikator IKPA, seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output sehingga didapatkan total nilai akhir IKPA sebesar 98,95%. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan SMART yang terdiri dari capaian output, efisiensi, konsistensi RPD, dan penyerapan anggaran sehingga menghasilkan nilai SMART sebesar 92,92%. Selanjutnya, nilai akhir IKPA diberi bobot 50% dengan capaian 98,95 dan nilai SMART diberi bobot 50% dengan capaian 92,92, diperoleh nilai SMART DJA sebagai hasil proyeksi IKU PKPA untuk penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal sebesar 95,94. Sehingga realisasi IKU kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Pematang Siantar tahun 2023 adalah sebesar 103,50% seperti digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.37			
Indikator IKPA Tahun 2023			
Indikator IKPA	s.d Triwulan IV Tahun 2023		
	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Nilai IKPA (Bobot 50%)			98,95%
Revisi DIPA	100,00%	10%	10,00%
Deviasi Halaman III DIPA	89,52%	10%	8,95%
Penyerapan Anggaran	100,00%	20%	20,00%
Belanja Kontraktual	100,00%	10%	10,00%
Penyelesaian Tagihan	100,00%	10%	10,00%
Pengelolaan UP dan TUP	100,00%	10%	10,00%
Dispensasi SPM	100,00%	5%	5,00%
Capaian Output	100,00%	25%	25,00%
Nilai SMART (Bobot 50%)			92,92%
Capaian Ouput	100,00%	43,50%	43,50%
Efisiensi	78,78%	28,60%	22,53%
Konsistensi RPD	99,25%	18,20%	18,06%
Penyerapan Anggaran	91,02%	9,70%%	8,83%
Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV			95,94%
Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV			103,50%

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Pematang Siantar sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan untuk mengetahui kinerja yang telah dilaksanakan guna mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja dapat digambarkan hasil yang telah dicapai untuk setiap sasaran sebagai berikut :

1. Realisasi berupa Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berasal dari PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 114,61% atau mencapai 114,61% dengan indeks batas maksimal dari target tahun 2023 sebesar 100% dengan rincian capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut :
 - a. Capaian PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp2.436.158.170,00.
 - b. Capaian PNBP Piutang Negara sebesar Rp7.059.695,00.
 - c. Capaian PNBP Lelang sebesar Rp 2.533.567.909,00.
2. Realisasi berupa Persentase Produktifitas Lelang s.d 31 Desember 2023 sebesar 366,00% dari target 80% dengan rincian 105 frekuensi lelang laku dari 498 frekuensi lelang secara keseluruhan sehingga menghasilkan capaian sebesar 105,00% atau mencapai 120,00% dengan indeks batas maksimal.
3. Realisasi berupa Indeks Integritas s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 89,17 atau mencapai 100,56% dengan indeks batas maksimal.
4. Realisasi berupa Persentase Realisasi Pokok Lelang yang berasal dari Pokok Lelang Kelas I dan Pegadaian s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 128,91% atau mencapai 120,00% dengan indeks batas maksimal dengan nilai Rp96.681.126.091,00 dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau Rp75.000.000.000,00 dengan rincian capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut :
 - a. Pokok Lelang Kelas I sebesar Rp29.795.000.191,00.
 - b. Pokok Lelang Pegadaian sebesar Rp66.886.125.900,00.
5. Realisasi berupa Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp495.006.649,03 dan menghasilkan capaian sebesar 241,47% atau mencapai 120,00% dengan indeks batas maksimal.

6. Realisasi berupa Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 79,82% atau mencapai 117,38% dengan indeks batas maksimal dengan target sebesar 68%.
7. Realisasi berupa Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria) s.d 31 Desember 2023 adalah 568 NUP dengan capaian sebesar 160% dengan target 100% atau mencapai 120,00% dengan indeks batas maksimal.
8. Realisasi berupa Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada KPKNL Pematang Siantar s.d 31 Desember 2023 adalah 29 BKPN dari target tahun 2023 sebesar 28 BKPN dengan capaian sebesar 103,57% atau mencapai 103,57% dengan indeks batas maksimal.
9. Realisasi berupa Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) s.d 31 Desember 2023 adalah:
 - ✓ sebanyak 36 NUP dari target tahun 2023 adalah 37 NUP untuk Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN
 - ✓ sebanyak 11 NUP dari target tahun 2023 adalah 9 NUP untuk Target/Realisasi Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja BMNDengan demikian, capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah sebesar 97,84% atau mencapai 120,00% dengan indeks batas maksimal.
10. Realisasi berupa Persentase Permohonan Lelang *Online* s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 97,62% dari target 86% atau mencapai 113,51% dengan indeks batas maksimal.
11. Realisasi berupa Persentase Pelaksanaan Lelang *E-auction* dan *E-conventional Auction* s.d 31 Desember 2023 adalah sebesar 100% dari target 94% atau mencapai 106,38% dengan indeks batas maksimal.
12. Realisasi berupa Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian s.d 31 Desember 2023 adalah sebesar 0,00% dari target 25% atau mencapai 120,00% dengan indeks batas maksimal.
13. Realisasi berupa Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 142,31% atau mencapai 120,00% dengan indeks batas maksimal.
14. Realisasi berupa Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 96,88% dari target 86 % atau mencapai 112.65% dengan indeks batas maksimal.

15. Realisasi berupa Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 120,00% dari target 100% atau mencapai 120,00% dengan indeks batas maksimal.
16. Realisasi berupa Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 103,50% dari target 100% atau mencapai 103,50% dengan indeks batas maksimal.
17. Realisasi berupa Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan s.d. 31 Desember 2023 adalah 161,00% dari target sebesar 100% atau mencapai 120% dengan indeks batas maksimal.
18. Realisasi berupa Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 0% dari target 15% atau mencapai 120% dengan indeks batas maksimal.
19. Realisasi berupa Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 99,14 dari target 80 atau mencapai 115,57% dengan indeks batas maksimal.
20. Realisasi berupa Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 99,22 dari target 60 atau mencapai 120% dengan indeks batas maksimal.

Dari 20 (dua puluh) IKU sebagai penjabaran dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Pematang Siantar, dapat disimpulkan seluruh IKU berstatus hijau, sehingga Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematang Siantar Tahun 2023 sebesar 115,57%.

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Pematang Siantar mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Untuk IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP Pengelolaan BMN), strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah mendorong satuan kerja K/L agar mengajukan permohonan pemanfaatan/sewa dan mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN terutama BMN dengan kondisi rusak berat kepada Pengelola Barang.

2. Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah

Untuk IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah melakukan koordinasi dengan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara terkait adanya perbedaan nilai antara nilai yang disetujui oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari permohonan satuan kerja dengan nilai wajar hasil penilaian.

3. Seksi Piutang Negara

- a. Untuk IKU PNPB Piutang Negara dan IKU tingkat penurunan outstanding piutang negara, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah melakukan penagihan secara *on the spot* ke lapangan untuk Piutang Negara yang nilainya masih potensial.
- b. Untuk IKU efektivitas penyelesaian BKPN, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah melakukan percepatan penyelesaian BKPN lama dengan menerbitkan PSBDT terhadap BKPN yang sudah memenuhi syarat untuk di-PSBDT-kan serta melakukan tahap pengurusan piutang negara secara optimal hingga lunas.

4. Pejabat Fungsional Pelelang

- a. Untuk IKU PNPB Lelang, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah memperluas publikasi mengenai objek lelang berupa deksripsi dan foto yang menarik untuk mengajak masyarakat mengikuti lelang.
- b. Untuk IKU persentase produktifitas lelang, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah sebagai berikut:
 - Koordinasi kepada *stakeholder* tentang pemberian label/pengelompokan objek lelang berdasarkan tingkat laku dan permasalahan yang melekat pada objek lelang, sehingga calon pembeli lebih yakin dan tertarik.
 - Memberikan edukasi dibidang lelang dan hukum agar pemohon lelang tidak takut mengajukan lelang.
- c. Untuk IKU persentase implementasi *e-auction* dan *e-conventional auction*, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah sebagai berikut:
 - Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada *stakeholder* perihal keunggulan lelang dengan cara *e-auction* dan *e-conventional auction*.
 - Memberikan alternatif solusi kepada *stakeholder* berupa penyediaan fasilitas bantuan bagi masyarakat yang berminat yang berlokasi di wilayah terpencil (belum akrab dengan internet) untuk dapat mendaftar pada *website* Portal Lelang Indonesia (www.lelang.go.id) agar dapat menjadi peserta lelang.

5. Subbagian Umum

Untuk IKU kualitas pelaksanaan anggaran, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Semakin kecil deviasi antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- b. Semakin rendah rasio jumlah SPM salah, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- c. Semakin rendah rasio jumlah Retur SP2D, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- d. Semakin rendah rasio pagu minus, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- e. Semakin tinggi rasio konfirmasi capaian output, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- f. Semakin tepat waktu pengelolaan Uang Persediaan (UP), maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- g. Semakin tepat waktu rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-8/WKN.02/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEMATANG SIANTAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Peta Strategi

Visi DJKN

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian keuangan : Menjadi Pengelola Keuanagn Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar0besar kemakmuran rakyat

Stakeholder

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif

Customer

8. Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Internal Process

5. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

6. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Learning & Growth

3. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

2. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

4. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEMATANG SIANTAR
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
		2c-CP Persentase Pelaksanaan permohonan lelang online	86%
		2c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68
		3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
		3c-CP Persentase Penyelesaian BKPN	100%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
		4b-CP Rata-Rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien	70%
5.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86
		5b-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%
6.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	6a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
		6b-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	7a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5
		7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
8.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	8a-CP Indeks Integritas	88,67
		8b-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100
		8c-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60



Program/Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	223.013.000
1. Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp	62.637.000
2. Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara		
3. Risalah Lelang	Rp	6.652.000
4. Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)		
5. Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio aset	Rp	13.084.000
6. Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	Rp Rp	40.000.000 14.756.000
7. Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	Rp	20.954.000
8. Rekomendasi Hasil Penilaian		
9. Penggalian Potensi Lelang	Rp	2.432.000
10. Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	Rp Rp Rp	32.480.000 60.000.000 7.478.000
Program Dukungan Manajemen		
1. Layanan Bantuan Hukum		
2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp	1.614.224.000
3. Kerumahtangan	Rp	14.202.000
4. Layanan Perkantoran	Rp	28.600.000
5. Peralatan fasilitas perkantoran	Rp	95.088.000
6. Kehumasan	Rp	1.453.854.000
7. Layanan Pengawasan Internal	Rp	9.229.000
	Rp	5.600.000
	Rp	7.651.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Tedy Syandriadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Setiyo Pambudi



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEMATANG SIANTAR
KEMENTERIAN KEUANGAN**



TA HUN 2023 Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan								
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
2d-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
3. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal								
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50	50	55	55	68	68
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3c-CP	Persentase Penyelesaian BKPN	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-Rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif								
5a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50	50	-	50	86	86
5b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif								
6a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
6b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	80	80	-	-	80	80
7. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal								
7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
8. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif								
8a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
8b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100	100
8c-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60



Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Setiyo Pambudi



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2023**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	-	-	-	-	-	-	-	-

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN
1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PERIODE PENILAIAN:

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Setiyo Pambudi



PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Agus Setiyo Pambudi, S.Kom., M.M.	NAMA	Tedy Syandriadi	
NIP	197808052002121001	NIP	196508291991031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase Produktivitas Lelang	100	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan



4.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	86	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	100	Penerima Layanan
6.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	Penerima Layanan
7.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipatkan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase Penyelesaian BKPN	100%	Proses Bisnis
10.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	Proses Bisnis



	Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)			
11.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Rata-Rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien	70	Proses Bisnis
12.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	68	Proses Bisnis
13.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	Proses Bisnis
14.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran



	Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)			
16.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Indeks Integritas	86,67	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pematang Siantar, 31 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik

Agus Setiyo Pambudi

197808052002121001



Ditandatangani secara elektronik

Tedy Syandriadi

196508291991031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	25 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
2	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	80	80
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10	30	30	60	60	100	100
5	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20	40	40	63	63	86	86
6	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	94	94	94	94	94	94
7	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		50	50	55	55	68	68



8	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipatkan		40	40	60	60	100	100
9	Persentase Penyelesaian BKPN	10	30	30	60	60	100	100
10	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	25	25	25	25	25	25
11	Rata-Rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien	70	70	70	70	70	70	70
12	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50	50			86	86
13	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
15	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		80	80			80	80
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
17	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	50	85	85	100	100
18	Indeks Integritas						86,67	86,67
19	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP						100	100
20	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						60	60
KONSEKUENSI								



1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pematang Siantar, 31 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Agus Setiyo Pambudi

197808052002121001



Ditandatangani secara elektronik

Tedy Syandriadi

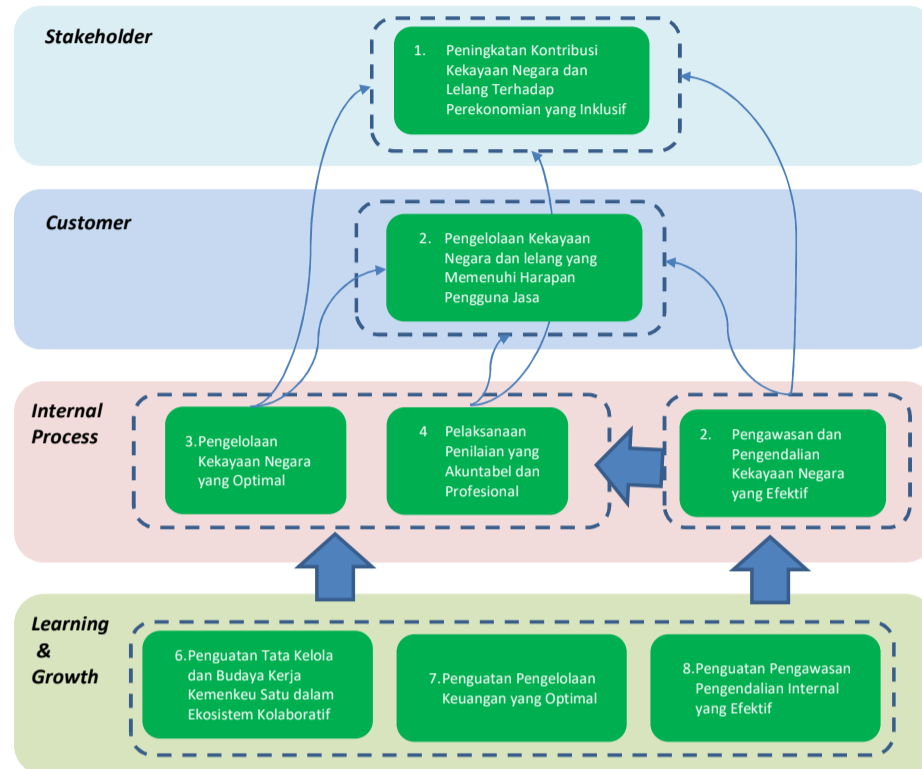
196508291991031001



ADDENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-8A/WKN.02/2023

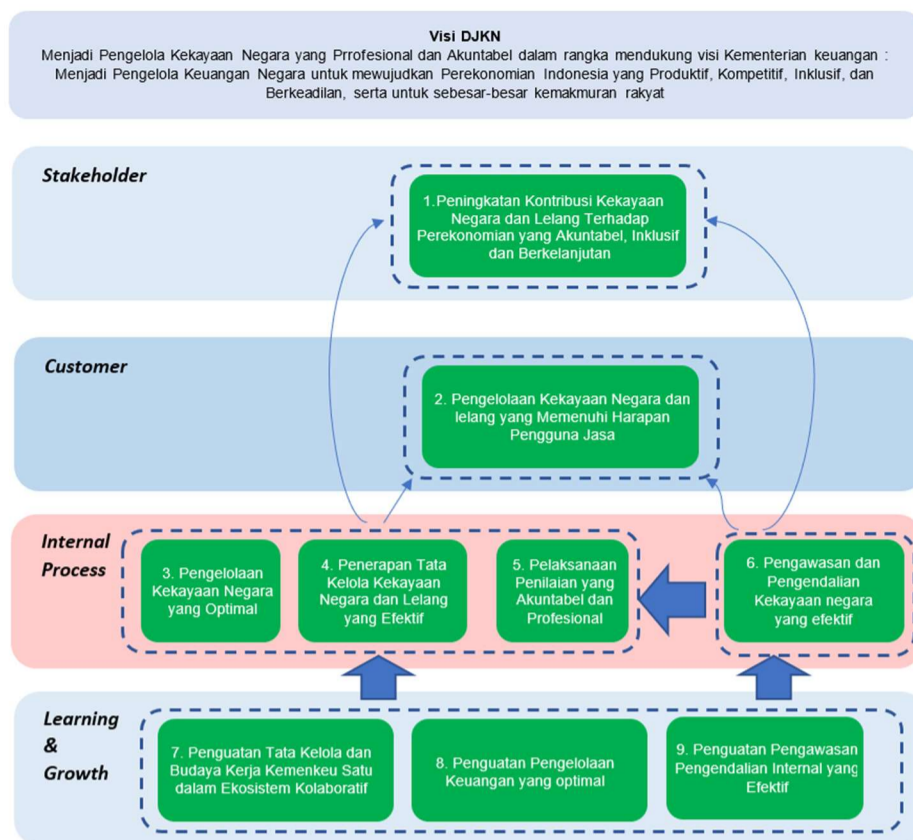
Pada hari ini, telah disepakati adanya addendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-8/WKN.02/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Peta Strategis sebelum addendum:



Peta Strategis setelah addendum:





a. Perubahan Nama Sasaran Strategis

Sebelum					Menjadi						
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
<i>Stakeholder perspective</i>					<i>Stakeholder perspective</i>						
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan				
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal					8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				

b. Penambahan Sasaran Strategis

Sebelum	Menjadi		Penjelasan
	Kode SS	Sasaran Strategis	
-	<i>Internal process perspective</i>		Sasaran Strategis (SS) ditambahkan sebagai sasaran dari pencapaian IKU Persentase Pelaksanaan permohonan lelang online, Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction, dan Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).
	5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	



c. Pergeseran Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4
<i>Learning and growth perspective</i>						<i>Stakeholder perspective</i>					
8	Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan				
8a-CP	Indeks integritas	-	-	-	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	-	88,67
<i>Customer perspective</i>						<i>Internal process perspective</i>					
Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan Pengguna Jasa						Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif					
2c-CP	Persentase Pelaksanaan permohonan lelang online	63%	63%	86%	86%	5a-CP	Persentase Pelaksanaan permohonan lelang online	63%	63%	86%	86%
2d-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	5b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%
<i>Internal Process</i>						<i>Customer perspective</i>					
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal						Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal					
5b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	8c-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif						Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					
6b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80	9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80



d. Penambahan IKU

Sebelum	Menjadi						Penjelasan
	Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				
			Q3	S.d. Q3	Q4	Y	
-	5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	IKU baru berada di Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

e. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
9a1-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari PK Kepala KPKNL Pematang Siantar

f. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	60%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100

g. Perubahan Kode IKU

Kode IKU		Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
5	6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif
6	7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif
7	8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal
8	9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif
9a-CP	1c-CP	Indeks Integritas
3b-CP	5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction
3c-CP	5b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online
5a-CP	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
6a-N	7a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
7a-CP	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran



7b-N	8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
5b-CP	8c-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN
6b-N	9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko
8c-N	9c-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Addendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Utara



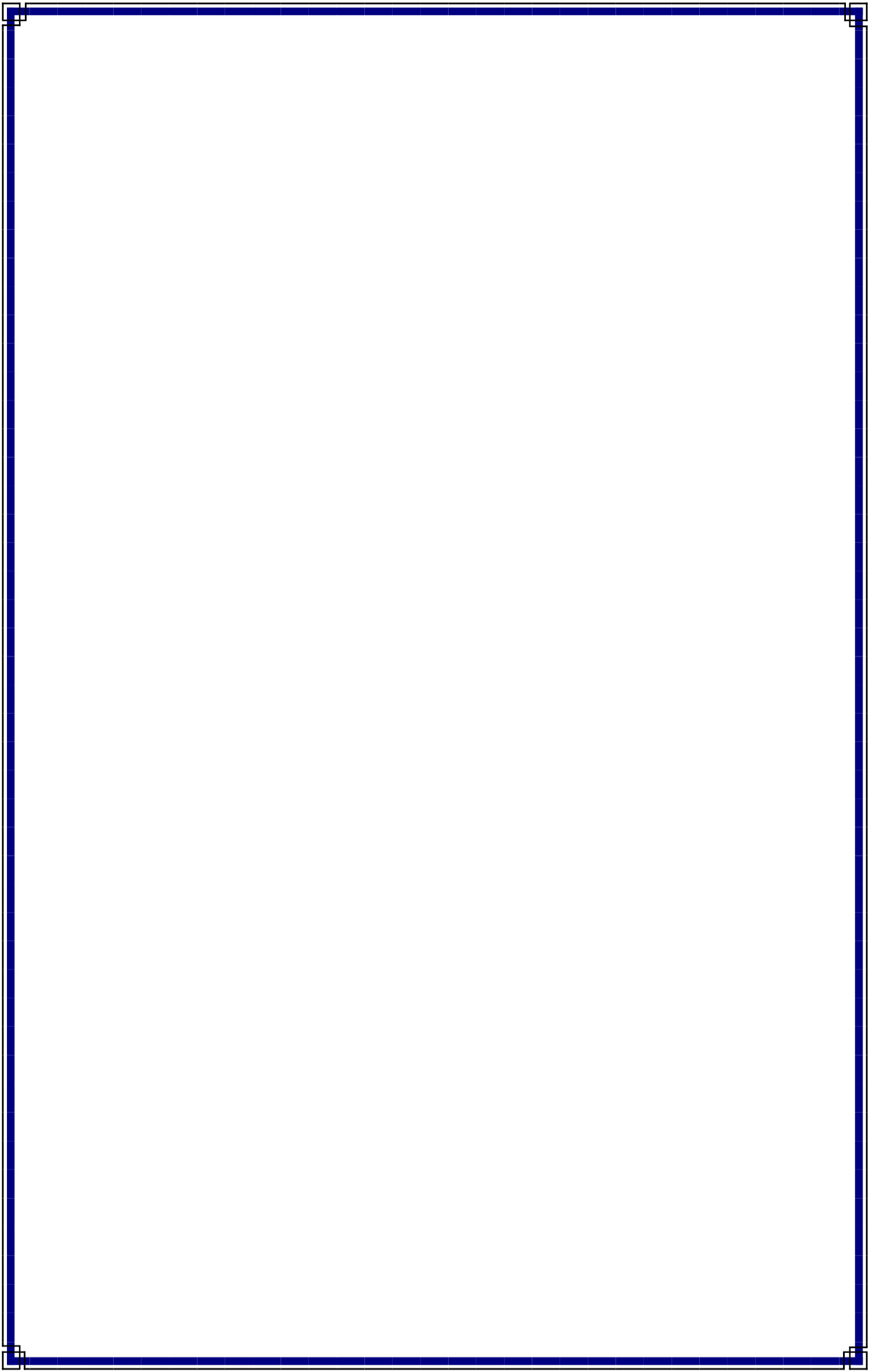
Ditandatangani secara elektronik
Dodok Dwi Handoko

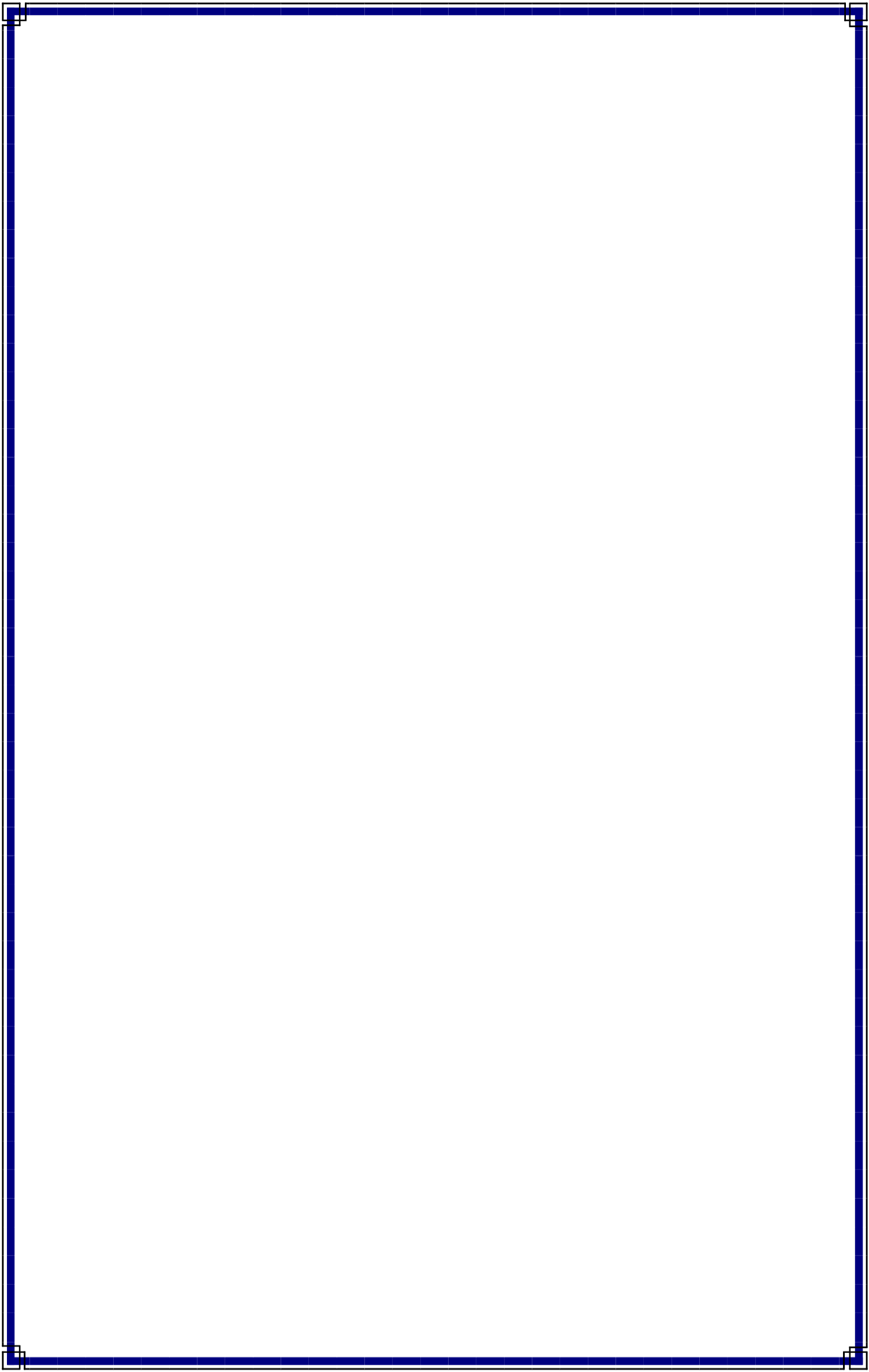
Medan, 27 September 2023
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik
Agus Setiyo Pambudi







ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya addendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala KPKNL Pematang Siantar tanggal 27 September 2023, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	86%	Penerima Layanan
		Persentase Pelaksanaan Lelang E Auction dan E Conventional Auction	94%	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	



Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	Proses Bisnis
		Rata-Rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien	70%	
5.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86	Proses Bisnis
		Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Penguatan Internal
6.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal
		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	
7.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Anggaran
8.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)	Indeks Integritas	88,67	Penguatan Internal
		Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100	
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	



Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	
		Indeks Integritas	88,67	
2	Pengelolaan kekayaan Negara dan lelang yang Memenuhi Harapan pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Proses Bisnis
		Persentase Penurunan Outstandig Piutang Negara	100%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK	68%	Proses Bisnis
		Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	Proses Bisnis
		Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	Proses Bisnis



6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	86%	Proses Bisnis
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal dan Anggaran
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	Penguatan Internal dan Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal dan Anggaran
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	



B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Skema pertanggungjawaban

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	60%	60%	100%	100%	1.	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	60%	60%	100%	100%
2.	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	2.	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
3.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%	3.	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
4.	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%	4.	Persentase Realisasi Pokok Lelang				100%
5.	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	-	-	-	86%	5.	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				100%
6.	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	-	-	94%	6.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK	55	55	100%	100%
7.	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	86%	86%	86%	86%	7.	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	60%	60%	-	86%
8.	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	-	-	-	100%	8.	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	-	94%
9.	Persentase Penyelesaian BKPN	60%	60%	100%	100%	9.	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	86%	86%



Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10.	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	25%	25%	25%	10.	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	63%	63%	-	100%
11.	Rata-Rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien	70%	70%	70%	70%	11.	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	-	100%
12.	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	86	12.	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	25%	25%	25%
13.	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	13.	Rata-Rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien	70%	70%	70%	70%
14.	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%	14.	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	50	70%	70%
15.	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80	15.	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	-	86
16.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	16.	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	15%	15%
17.	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	17.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75%	75%	100%	100%
18.	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67	18.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	80	80	100	100
19.	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	100	100	19.	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	95,5	95,5



Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
20.	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	60	60	20.	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	100%	100%

Addendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Utara



Ditandatangani secara elektronik
Dodok Dwi Handoko

Medan, 27 September 2023
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik
Agus Setiyo Pambudi



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPKNL Pematang Siantar
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100,00%	114,61%	114,61%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80,00%	105,00%	120,00%
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100,00%	128,91%	120,00%
		2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100,00%	241,47%	120,00%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68,00%	79,82%	117,38%
		3b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100,00%	160,00%	120,00%
		3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BPKN)	100,00%	104,00%	103,57%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	4a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	80,00%	97,84%	120,00%
		4b-CP	Persentase Permohonan Lelang Online	86,00%	97,62%	113,51%
		4c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Coventional Auction	94,00%	100,00%	106,38%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25,00%	0,00%	120,00%
		5b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70,00%	142,31%	120,00%

6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,00%	96,88%	112,65%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem	7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100,00%	120,00%	120,00%
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00%	103,50%	103,50%
		8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100,00%	161,00%	120,00%
		8c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15,00%	0,00%	120,00%
9	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	9a-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	99,14	115,57%
		9b-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	99,22	120,00%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023	: Rp 1.857.775.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023	: Rp 1.691.039.054,00 (91,02%)

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2023

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)	30%						33,18%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							110,61%	
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	114,61%	14%	30%	114,61%	114,61%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	105,00%	14%	30%	131,25%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88,67	89,17	19%	40%	100,56%	100,56%	hijau
	Customer Perspective(20%)	20%						24,00%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	128,91%	14%	50%	128,91%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	241,47%	14%	50%	241,47%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						28,94%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							114,62%	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	68%	79,82%	19%	37%	117,38%	117,38%	hijau
3b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	P/L	100%	160,00%	19%	37%	160,00%	120,00%	hijau
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	103,57%	14%	27%	103,57%	103,57%	hijau
4	Penerapan Tata Kelola kekayaan Negara dan lelang yang Efektif							112,17%	
4a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	80%	97,84%	14%	33%	122,30%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase Permohonan lelang Online	P/M	86%	97,62%	14%	33%	113,51%	113,51%	hijau
4c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94%	100,00%	14%	33%	106,38%	106,38%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25%	0,00%	14%	40%	200,00%	120,00%	hijau
5b-CP	Rata-Rata indeks penyelesaian Layanan Penilaian yang agile, efektif dan efisien	E/M	70%	142,31%	21%	60%	203,31%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							112,65%	
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86%	96,88%	14%	100%	112,65%	112,65%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						29,45%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							120,00%	
7a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100,0%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							113,36%	
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100,0%	103,50%	14%	33%	103,50%	103,50%	hijau
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100,0%	161,00%	14%	33%	161,00%	120,00%	hijau
8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	15,0%	0,00%	14%	33%	200,00%	120,00%	hijau
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif							120,00%	
9a-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	99,14	14%	50%	123,93%	115,57%	hijau
9b-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	P/M	60	99,22	14%	50%	165,37%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								115,57%	hijau

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR 119703

Tgl Data : 30/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 30/01/24 3:30 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,857,775,000	1,691,039,054	(166,735,946)	91	1,726,635,000	1,560,148,358	(166,486,642)	90
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Pematangsiantar, 30 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS SETIYO PAMBUDI
197808052002121001

Area Pelayanan Terpadu (APT)

KPKNL Pematang Siantar
Jl. Sisingamangaraja No.79, Kahean,
Kec. Siantar Utara, Kota Pematang
Siantar, Sumatera Utara

Layanan Virtual

-  (0622) 435935
-  0811-6075-111
-  KPKNL Pematangsiantar
-  @kpknlpematangsiantar
-  KPKNL Pematangsiantar
-  kpknlsiantar@kemenkeu.go.id
-  @kpknlpsiantar